



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Republik Indonesia

# Bahan Kementerian ESDM pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI

Jakarta, 23 November 2020



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



@KementerianESDM



@kesdm



KementerianESDM



Contact Center ESDM 136

# DAFTAR ISI

1	Rencana Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Sektor ESDM	3
	A. RPP tentang NSPK	5
	B. RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor ESDM	7
2	Kebijakan Pemanfaatan Batubara	9
3	Progres dan Proyeksi Pembangunan <i>Smelter</i> di Indonesia untuk Realisasi Hilirisasi Mineral	16



# 1. Rencana tindak lanjut UU Cipta Kerja sektor ESDM

# RPP PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA

UNDANG- UNDANG

RPP PELAKSANA

SUB SEKTOR

MATERI MUATAN

UU CIPTA KERJA

RPP NSPK  
(KLUSTER ESDM)

- Migas
- Minerba
- Ketenagalistrikan
- EBTKE

- Pemohon Perizinan Berusaha
- Perizinan Berusaha
- Kewajiban
- Prosedur/Tata Cara
- Pengawasan
- Sanksi
- Lampiran (KBLI-NON KBLI)

RPP SEKTOR ESDM

- Minerba
- Ketenagalistrikan
- EBTKE (Panas Bumi)

- Pengaturan Lain Selain NSPK
- Amanat UU Cipta Kerja
  - Pengaturan Lain Terkait



# A. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang NSPK (1/2)

## Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

- ❖ Jenis Perizinan Berusaha dalam Subsektor Minyak dan Gas Bumi.
- ❖ Skema pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Migas (Kontrak Kerja Sama diperlakukan sebagai Izin Usaha).
- ❖ Perizinan Berusaha (Nomor Izin Berusaha dan Izin Usaha) Dalam Rangka Pelaksanaan Survei Umum.
- ❖ Jenis Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- ❖ Skema Pengusahaan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha (Nomor Izin Berusaha dan Izin Usaha).
- ❖ Ketentuan Mengenai Kewajiban dan/atau Persyaratan Dalam pengajuan Permohonan Perizinan Berusaha
- ❖ Perizinan Penunjang untuk Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- ❖ Pengawasan Perizinan Berusaha Migas oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- ❖ Sanksi Administratif atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir dan Kegiatan Penunjang Minyak dan Gas yang dilakukan Tanpa Perizinan Berusaha

## Sub Sektor Mineral dan Batubara

- ❖ Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: nomor induk berusaha; sertifikat standar; dan/atau izin.
- ❖ Izin dalam perizinan berusaha kegiatan usaha pertambangan terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan.
- ❖ Kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha dan Perizinan Penunjang kegiatan usaha pertambangan.
- ❖ Menteri melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan pemegang perizinan berusaha dan pemegang perizinan penunjang kegiatan usaha pertambangan.
- ❖ Sanksi administratif

# A. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang NSPK (2/2)

## Sub Sektor Ketenagalistrikan

- ❖ Penyederhanaan perizinan berusaha.
- ❖ Pengendalian kebijakan energi mix nasional dan lingkungan (RUKN dan target komitmen NDC Indonesia sektor energi) dengan mengatur kewenangan pemerintah pusat.
- ❖ Badan usaha cukup mendapat akreditasi dari KAN dan izin pemerintah pusat.
- ❖ Pemerintah pusat menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang perizinan berusaha yang ditetapkan oleh pemerintah
- ❖ Pemerintah pusat melakukan pemberian nomor registrasi sertifikat laik operasi instalasi tenaga listrik, dan pemerintah daerah melakukan evaluasi dan/atau penerbitan sertifikat laik operasi.
- ❖ Sanksi administratif berupa: teguran tertulis; pembekuan kegiatan sementara; denda; dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Namun pengenaan sanksi administratif berupa denda, tidak menggugurkan pemenuhan kewajibannya.
- ❖ Memperluas pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan:
  - untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum : badan layanan umum;
  - untuk kegiatan jasa penunjang tenaga listrik : badan layanan umum dan badan usaha asing (kantor perwakilan

## Sub Sektor EBTKE

Perizinan pada subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi terdiri atas:

- ❖ Kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung; dan
- ❖ Kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain (Di luar substansi Undang-Undang tentang Cipta Kerja);

## B. RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor ESDM (1/2)

No.	Sub Sektor	Materi Muatan
1	Mineral dan Batubara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengenaan iuran produksi/royalti hingga 0% (nol persen) berdasarkan jumlah/tonase batubara yang digunakan di dalam negeri; dan</li><li>• Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif iuran produksi/royalti hingga 0% (nol persen) serta pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM, setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.</li></ul>
2	Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan;</li><li>• Penetapan Wilayah Usaha;</li><li>• Sertifikasi, Klasifikasi, dan Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;</li><li>• Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri;</li><li>• Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri;</li><li>• Tanggung jawab Konsumen dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;</li></ul>

## B. RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor ESDM (2/2)

No.	Sub Sektor	Materi Muatan
	Ketenagalistrikan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perhitungan Kompensasi atas Penggunaan Tanah oleh Pelaku Usaha Kegiatan Penyediaan Tenaga Listrik;</li><li>• Keselamatan Ketenagalistrikan, Sertifikat Laik Operasi, Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikat Kompetensi;</li><li>• Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik;</li><li>• Pembinaan dan Pengawasan; dan</li><li>• Kriteria, Jenis, Besaran Denda, dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.</li></ul>
3	EBTKE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengubah Nomenklatur IPB menjadi perizinan berusaha di bidang panas bumi;</li><li>• Mengubah nomenklatur Menteri menjadi pemerintah pusat;</li><li>• Norma baru terkait sanksi administratif oleh Menteri;</li><li>• Norma baru tentang nomor izin berusaha; dan</li><li>• Sanksi administrasi.</li></ul>

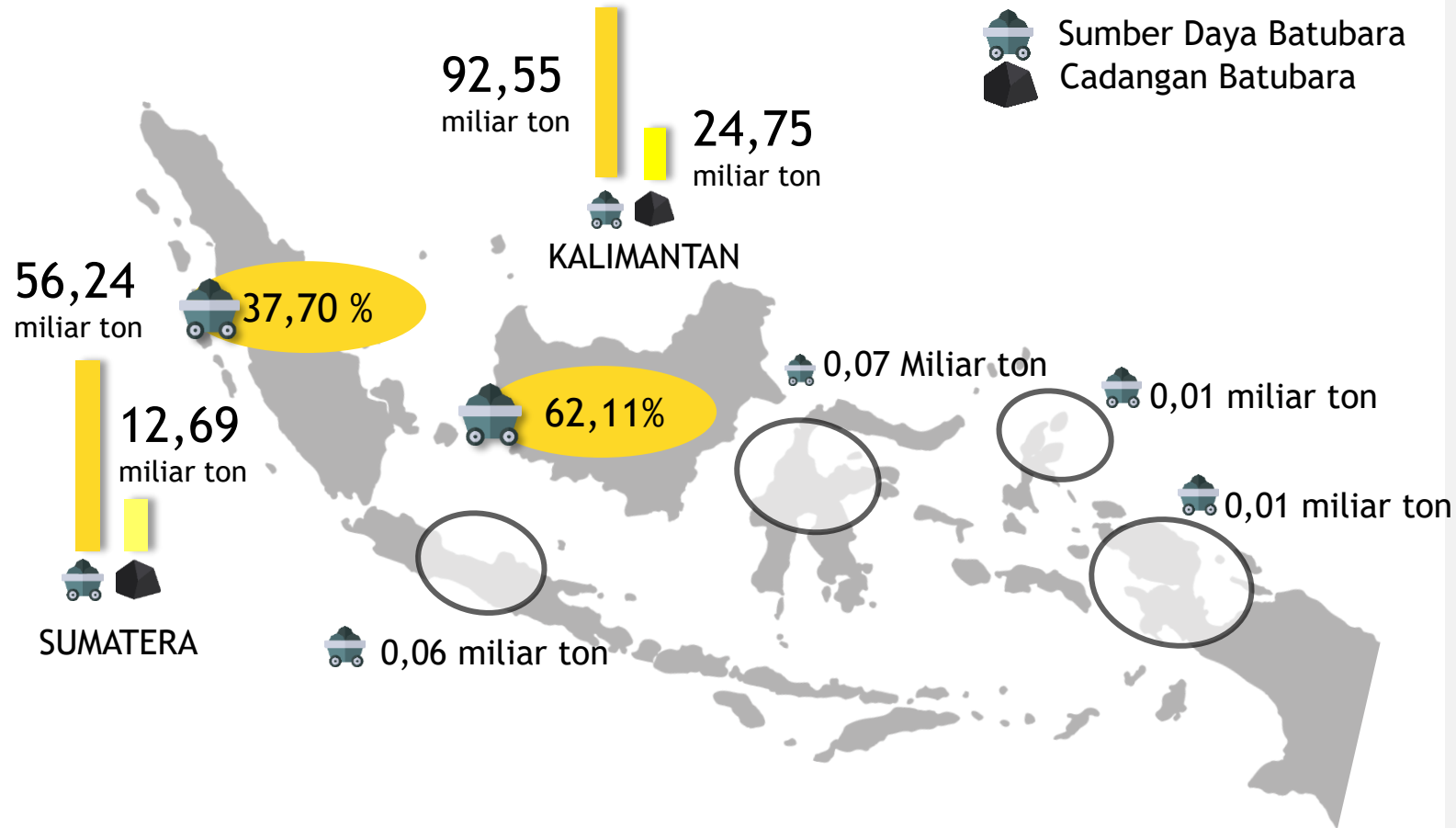




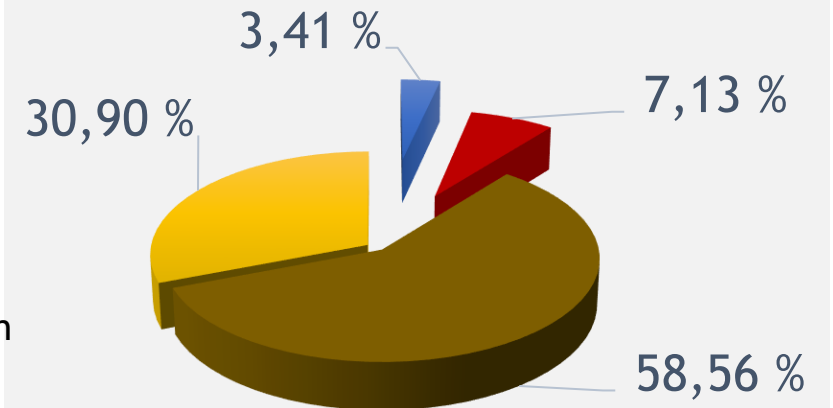
## 2. Kebijakan Pemanfaatan Batubara

# SUMBERDAYA DAN CADANGAN BATUBARA INDONESIA

90% cadangan batubara merupakan batubara kalori sedang dan rendah, sumber daya batubara **149,01 miliar ton** dan **cadangan 37,45 miliar ton**



## Komposisi Batubara Indonesia



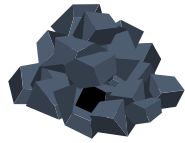
- Kalori sangat tinggi
- Kalori tinggi
- Kalori sedang
- Kalori rendah

Status : Desember 2019



# KEBIJAKAN

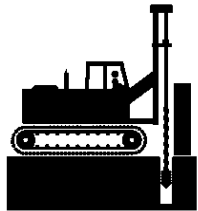
## PEMANFAATAN BATUBARA (PP NO.79/2014)



**Prioritas Batubara sebagai sumber energi**



**Konservasi dan pertambangan sesuai kaidah yang baik dengan memperhatikan lingkungan hidup**



**Peningkatan kegiatan eksplorasi batubara untuk tambang terbuka dan tambang bawah tanah**



**Peningkatan batubara dalam bauran energi nasional**



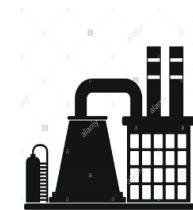
**Jaminan Pasokan batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri**



**Penetapan Harga Patokan Batubara, terutama untuk penggunaan batubara di dalam negeri**



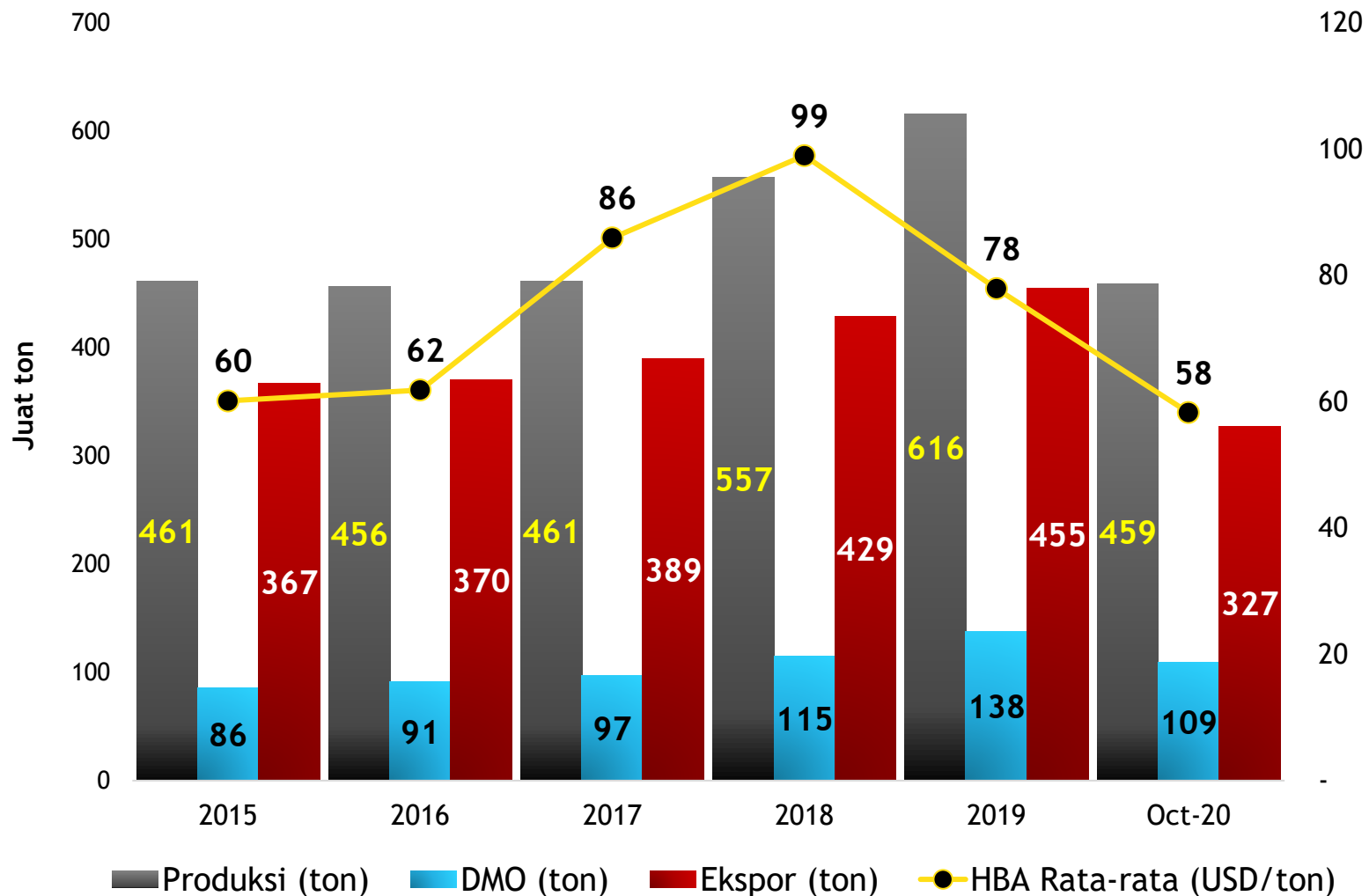
**Pembangunan infrastruktur batubara mendukung jaminan pasokan dan cadangan penyangga batubara**



**Peningkatan nilai tambah batubara.**

# PRODUKSI, EKSPOR DAN DMO

## BATUBARA NASIONAL (s.d. 30 Oktober 2020)



### Rencana 2020

PRODUKSI: 550 juta ton  
DMO : 155 juta ton

### Realisasi s.d. Oktober 2020

PRODUKSI : 459 juta ton  
(83% dari target)

EKSPOR  
a. Volume : 327 juta ton  
b. Nilai : USD13,38 miliar

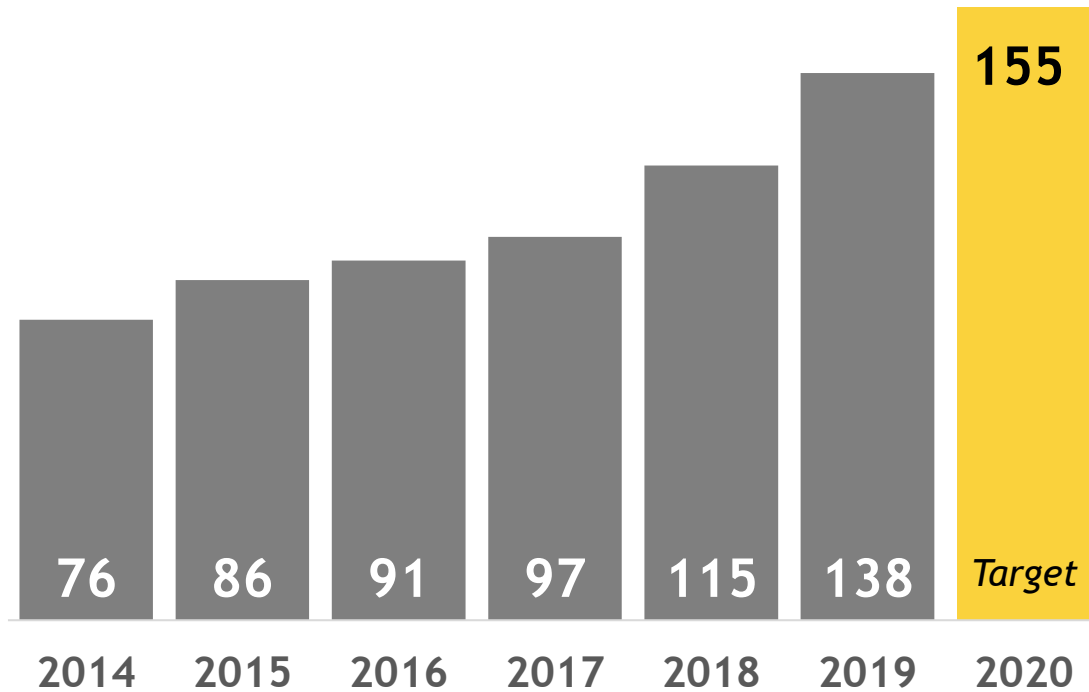
DMO : 109 juta ton  
(70% dari target)

”Kebutuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri TELAH TERPENUHI”



# REALISASI PEMANFAATAN BATUBARA DOMESTIK TAHUN 2015-2019

Satuan: Juta Ton

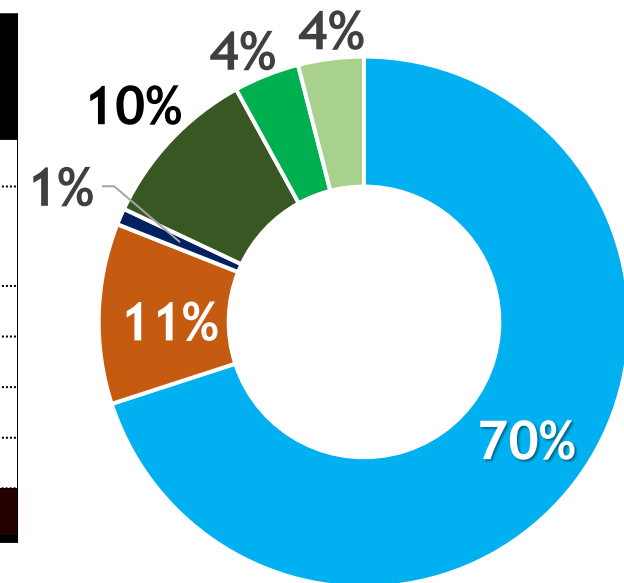


Kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri **DIJAMIN TERPENUHI** karena jumlah produksi batubara jauh lebih besar dan adanya kewajiban penjualan DMO 25% bagi pelaku usaha (Kepmen Nomor 261 K/30/MEM/2019)

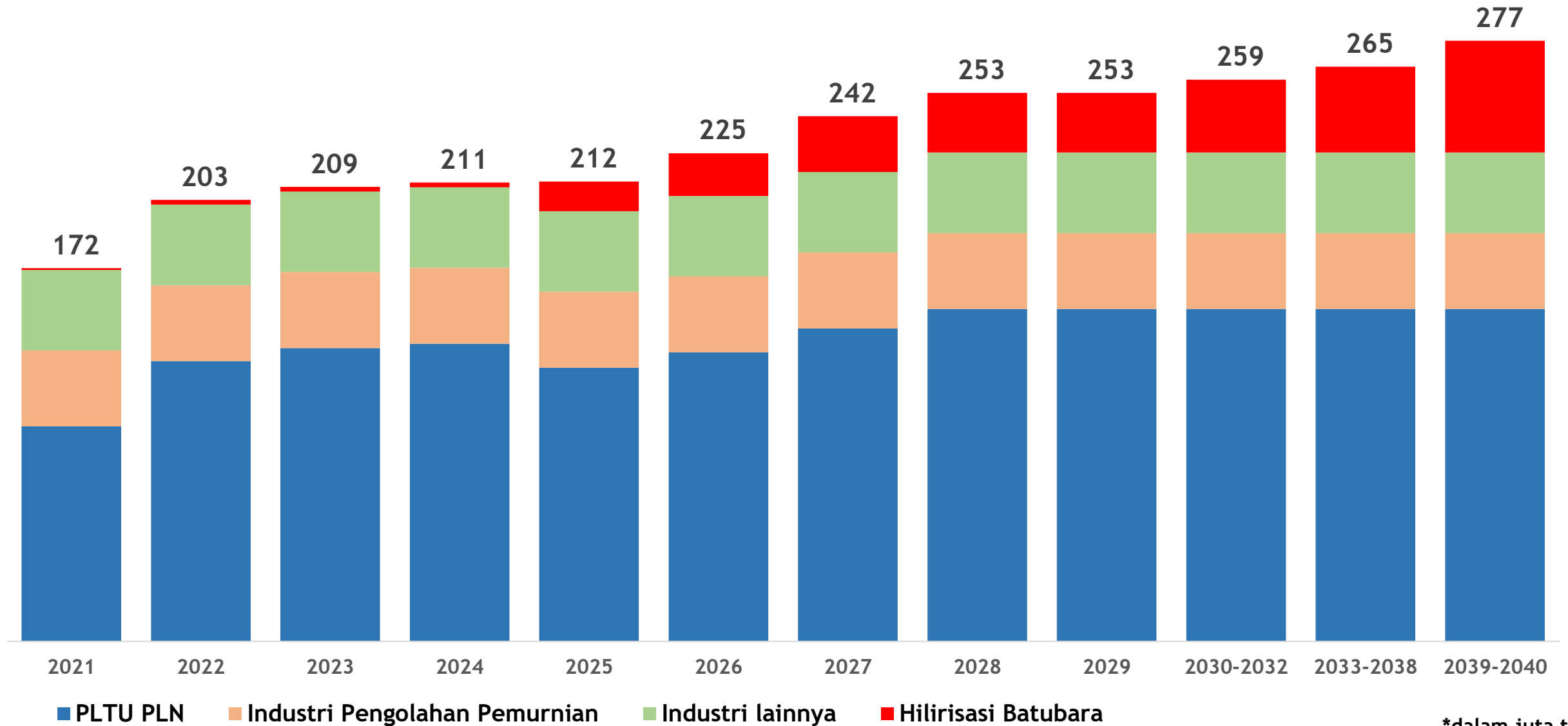
## RENCANA DMO BATUBARA TAHUN 2020

Kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebesar 155 juta ton

END USER	2020 (Juta Ton)
PLN	109
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	16,52
PUKUK	1,73
SEMEN	14,54
TEKSTIL	6,54
KERTAS	6,64
<b>TOTAL</b>	<b>155</b>



# PROYEKSI KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI TAHUN 2020-2040



\*dalam juta ton



# PERKEMBANGAN HILIRISASI BATUBARA INDONESIA

## COAL GASIFICATION

### 1. Coal to Methanol Project

- PT KPC (Bumi Resource - Ithaca Group - Air Product)
- **Est. COD : Tahun 2024**
- Lokasi : Bengalon - Kalimantan Timur
- *Feedstock* : 5 - 6.5 juta ton/tahun (GAR 4200 kcal/kg)
- Produk: 1.8 juta ton/tahun **Methanol**
- Status saat ini: Finalisasi FS & Skema Bisnis

### 2. Coal to DME Project

- PT Bukit Asam - Pertamina - Air Product
- **Est. COD : Tahun 2025**
- Lokasi : Tanjung Enim - Sumatera Selatan
- *Feedstock* : 6.5 juta ton/tahun (GAR 3700 kcal/kg)
- Produk : 1.4 juta ton/tahun **DME**
- Status saat ini: Finalisasi kajian dan Skema Subsidi DME untuk Substitusi LPG, negosiasi skema bisnis proyek

### 3. Coal to Methanol Project

- PT Arutmin Indonesia
- **Est. COD : Tahun 2025**
- Lokasi : IBT Terminal - Pulau Laut Kalsel
- *Feedstock* : 6 juta ton/tahun (GAR 3700 kcal/kg)
- Produk: 2.8 juta ton/tahun **Methanol**
- Status saat ini: Finalisasi Kajian ( Pra-FS )

### 4. Coal to Methanol Project

- PT Adaro Indonesia
- **Est. COD : Tahun 2027**
- Lokasi : Kotabaru - Kalsel
- *Feedstock* : 1.3 juta ton/tahun
- Produk: 660 ribu ton/tahun **Methanol**
- Status saat ini: Finalisasi Kajian ( Pra-FS )

## UNDERGROUND COAL GASIFICATION

Masih tahap skala *Pilot Project* :

- *Project UCG* PT Kideco Jaya Agung di Kalimantan Timur
- *Project UCG* PT Indominco di Kalimantan Timur
- PT. Medco Energi Mining International (MEMI) dan Phoenix Energi Ltd, di Kalimantan Utara

## COKES MAKING

Semi Cooking Coal Plant Project

PT Megah Energi Khatulistiwa (MEK)

- Lokasi: Bulungan - North Kalimantan
- *Feedstock* : 1.000.000 ton/tahun (500.000 ton CV 3100 kcal/kg + 500.000 ton CV 6300 kcal/kg)
- Produk : 600.000 ton *Semi Coke*, 50 thousand *Coal Tar*

## COAL UPGRADING

PT ZJG Resources Technology

- Lokasi : Bulungan - Kaltara
- Produk : 100.000 ton/tahun

## COAL BRIQUETTING

- Pabrik Briket PT Bukit Asam (Sumatera Selatan)  
*Feedstock*: 30.000-40.000, Produk: 10.000-20.000 briket (ton/tahun)
- Pabrik Briket PT Thriveni (Sumatera Selatan)  
*Feedstock*: 130.000, Produk: 79.000 -85.000 (ton/tahun)

## COAL LIQUIFACTION

## COAL SLURRY

- Belum ada yang mengusulkan
- Potensi untuk dikembangkan



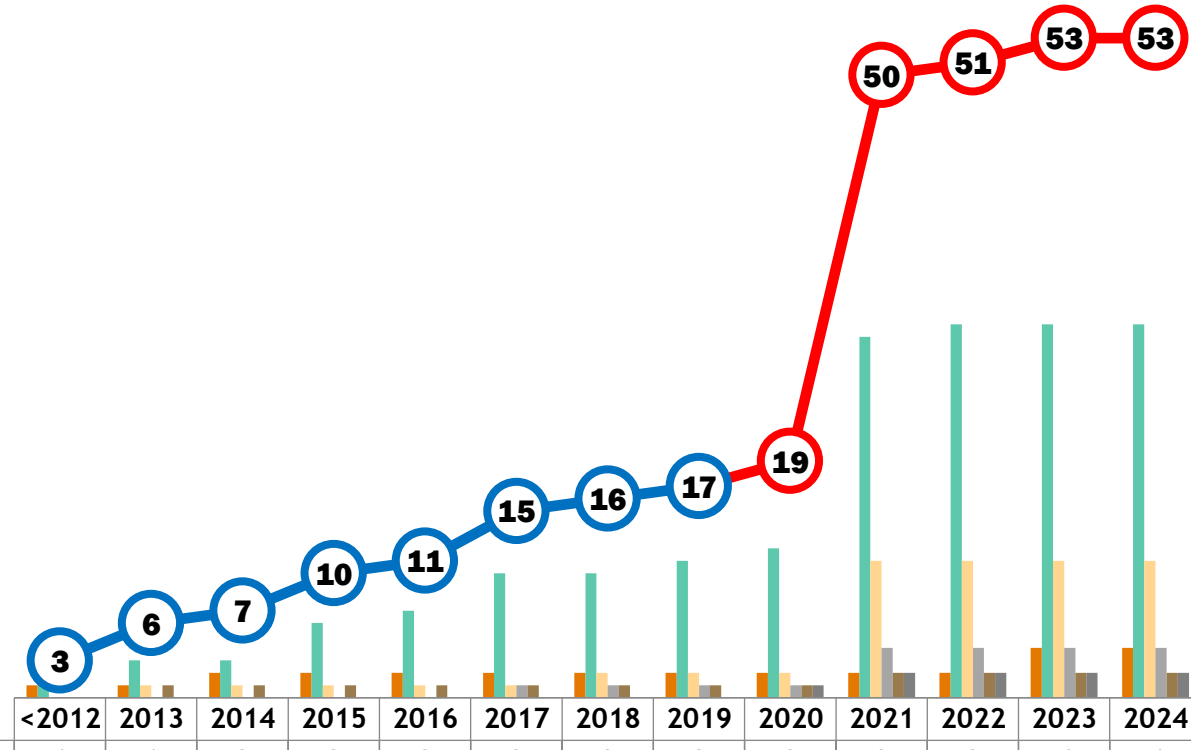


### 3. Progres dan Proyeksi Pembangunan *Smelter* di Indonesia untuk Realisasi Hilirisasi Mineral



# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL

○ Prognosis  
○ Eksisting



Komoditas	Jumlah Smelter			Total Investasi (Juta \$)	Realisasi Investasi s.d Sem 1-2020 (Juta \$)
	Eksisting	Rencana	TOTAL		
Nikel	12	18	30	8.006,5	6.261,2
Bauksit	2	9	11	8.647,2	4.293,7
Besi	1	3	4	193,9	140,5
Tembaga	2	2	4	4.693,2	1.332,8
Mangan	1	1	2	23,9	13,3
Timbal dan Seng	0	2	2	28,8	19,7
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>53</b>	<b>19.945,1</b>	<b>10.828,9</b>

	<2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<span style="color: orange;">■</span> Tembaga	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4
<span style="color: teal;">■</span> Nikel	2	3	3	6	7	10	10	11	12	29	30	30	30
<span style="color: yellow;">■</span> Bauksit	0	1	1	1	1	1	2	2	2	11	11	11	11
<span style="color: grey;">■</span> Besi	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	4	4	4
<span style="color: brown;">■</span> Mangan	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
<span style="color: darkgrey;">■</span> Timbal dan Seng	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2
<span style="color: red;">○</span> Target	3	6	7	10	11	15	16	17	19	50	51	53	53

Catatan: Hingga November 2020 smelter yang telah selesai dibangun 18 fasilitas pemurnian dan 35 unit masih *on progress*

# PROGRES

## PEMBANGUNAN *SMELTER* TEMBAGA PTFI



**PT FREEPORT  
INDONESIA**

- FS, *early works*, *Front End Engineering Design* (FEED) 100%.
- Advanced Detail Engineering 39%.
- Pematangan Lahan (Ground Improvement)
  - Pemasangan *Pre-Fabricated Vertical Drain* (PVD) dan *PreFabricated Horizontal Drain* (PHD) 100%;
  - *Earthwork (General Fill & Surcharge Layers)* 100%.
- Amandemen izin lingkungan UKL/UPL.
- Investasi *Smelter* Total sampai dengan akhir Agustus 2020 adalah sebesar USD300 juta.

**Konsolidasi fondasi 60-70% dan belum mulai piling<sup>\*)</sup>**

<sup>\*)</sup> Rencana Oktober 2020 - Januari 2021

Progres *Smelter*

**5,86 %**

Rencana Selesai

**2023**

Kapasitas *Smelter*

**2 Juta** Ton  
Per tahun  
Konsentrat Tembaga



# EVALUASI PERKEMBANGAN PROGRESS FISIK PEMBANGUNAN SMELTER PT. FI

- 1** Telah disampaikan Surat Teguran dari Dirjen Minerba kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) pada tanggal 30 September 2020 No. 1197/36/DJB/2020 hal Surat Teguran Terlambatnya Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pemurnian PT Freeport Indonesia, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - ❖ Agar pelaksanaan *pilling test* dan *pile load test* dipercepat dan dapat dilaksanakan paling lambat akhir Oktober 2020.
  - ❖ PT FI diminta untuk segera menyampaikan *time line* untuk pelaksanaan kegiatan *pilling test* dan *pile load test*.
- 2** Atas Surat Teguran di atas, PT FI memberikan tanggapan melalui surat nomor 508/OPD-PTFI/IX/2020 tanggal 30 September 2020 , yang menyampaikan bahwa *pilling test* dan *pile load test* akan mengalami keterlambatan, semula direncanakan pada akhir bulan September 2020, namun baru dapat dilakukan pada awal November 2020.
- 3** PT FI kembali menyampaikan surat nomor 516/OPD-PTFI/XI/2020 tanggal 11 November 2020 perihal jawaban surat teguran terlambatnya kegiatan konstruksi pembangunan fasilitas pemurnian PT Freeport Indonesia (PT FI), yang menyampaikan bahwa :
  - ❖ PT FI sudah memberikan *Notice to Proceed* ke Chiyoda untuk melakukan pekerjaan *test pilling*.
  - ❖ Chiyoda sudah mulai melakukan pengadaan dan mobilisasi peralatan serta pekerja ke Gresik.
  - ❖ Kegiatan fisik *test pile drive* di area prioritas pembangunan smelter baru dapat dilakukan pada akhir November 2020.

# KENDALA DAN UPAYA PEMBANGUNAN SMELTER DI TENGAH PANDEMI

## Upaya

melakukan fasilitasi terhadap pembangunan *smelter* dengan menyusun program *Quick Win* yang kegiatannya antara lain:

## Kendala

- 1 Tertundanya *delivery* peralatan maupun kedatangan tenaga ahli dari negara luar.
- 2 Penerapan PSBB di Indonesia menghambat mobilisasi tenaga kerja dan logistik.
- 3 Kesepakatan pendanaan tertunda.

- 1 Pertemuan dengan para pembangun *smelter* untuk mengetahui kendala yang dihadapi;
- 2 *One on One Meeting* antara pembangun smelter dengan PLN;
- 3 Penyusunan info memo perusahaan pembangun *smelter* untuk nantinya ditawarkan kepada para calon investor dan calon pendana;
- 4 *One on One meeting* dan kerjasama dengan MKU Services LLC di Houston, Amerika Serikat dalam rangka *Market Sounding* untuk mencari investor;
- 5 Koordinasi dengan Kemenko Perekonomian dalam mendorong terbangunnya *smelter* dengan memasukkan kedalam Proyek Strategis Nasional, sehingga kendala-kendala yang dihadapi terutama dari sisi administrasi bisa dengan cepat terselesaikan.

# Terima kasih

[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)

Untuk update berita dan informasi sektor ESDM

Ikuti kami di akun media sosial:



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



@kesdm



@KementerianESDM



KementerianESDM

